

**Analisis Implementasi Manajemen Kampanye dalam Kampanye Anti Narkoba pada
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau) Divisi Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Seksi Pencegahan Tahun 2017.**



NASKAH PUBLIKASI

**Disarikan dari Skripsi yang diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia**

Oleh :

NADRA ALFIATI

14321049

SUMEKAR TANJUNG, S.Sos., M.A

NIDN: 0514078702

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

Naskah Publikasi

**Analisis Implementasi Manajemen Kampanye dalam Kampanye Anti Narkoba pada
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau) Divisi Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Seksi Pencegahan Tahun 2017**

Disusun Oleh

NADRA ALFIATI

14321049

16 AUG 2018

Telah disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi pada

Dosen Pembimbing Skripsi



Sumekar Tanjung, S.Sos., M.A

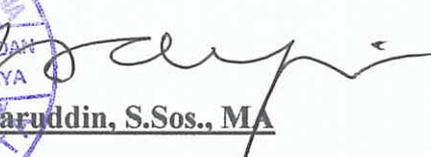
NIDN: 0514078702

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia




Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA

NIDN: 0516087901

Analisis Implementasi Manajemen Kampanye dalam Kampanye Anti Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau) Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Seksi Pencegahan Tahun 2017

Nadra Alfiati

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII, menyelesaikan Studi pada tahun 2018

Sumekar Tanjung, S.Sos.,M.A

Staff Pengajar Program Ilmu Komunikasi FPSB UII

Abstract :

Along with the times, there are many social problems that arise in the community. One such drug abuse. Drugs is an acronym for narcotics and hazardous materials. Riau Province in Indonesia the number of users of drugs and illegal drugs are increasing, especially among teenagers.

By looking at this reality and the need for movement or campaign carried out by the authority as of the National Narcotics Agency of Riau province in which there are divisions Prevention and Community Empowerment for performing these duties, the formulation of the problem in this research is: "How Management Implementation Campaign in Campaign drugs on the National Narcotics Agency Province of Riau (Riau BNNP) Division of Prevention and Community Empowerment (P2M) Year 2017? ".

Results of this research is the implementation of campaign management conducted by the Prevention Section of the Division of Prevention and Community Empowerment (P2M) in conducting campaigns or P4GN Information Dissemination can be said according to the theory. However, the evaluation stage, Prevention Section conducted a survey to an audience less anti-drug campaign. At campaign events or dissemination of information P4GN conducted by the Prevention Section, there is a supporting factor as follows: coming from the outside / external BNNP Riau Riau province that is society that has begun enthusiastic about the drug abuse cases in Riau Province. While the internal / BNNP Riau namely the presence of a strong teamwork among members and also enough budget to implement P4GN information dissemination activities. Of obstacles, namely, the lack of human resources (HR) and not the presence of an audience survey of the mass media

Keywords: Drugs, Campaign Management, BNNP Riau.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, dalam kurun waktu 30 tahun (1970-2000), jumlah dari pemakai narkoba naik hingga 150 kali lipat. Selain itu, beberapa data membuktikan bahwa 97 persen masyarakat Indonesia mengetahui efek dari penyalahgunaan narkoba, tetapi hal itu dianggap tidak begitu penting (Setiyawati, dkk., 2015 : 88-90). Dari data tersebut, dapat diketahui meningkatnya pemakai atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari narkoba. Dengan bagitu, kesempatan ini digunakan oleh para oknum untuk menjual belikan narkoba kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Selain itu, barang narkoba mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga menguntungkan para penjualnya. Alasan ini juga yang membuat banyak masyarakat menjadi penjual barang haram tersebut.

Narkoba tidak sepenuhnya dilarang penggunaannya di Indonesia. Narkoba dapat digunakan dalam dunia kesehatan jika tidak melebihi dosis, dan juga digunakan dalam ilmu pengetahuan. Didalam dunia kesehatan, narkoba dapat menyembuhkan penyakit atau dapat mengurangi rasa sakit. Namun, banyak masyarakat yang menyalahgunakan obat tersebut sebagai obat penenang maupun sebagai penghibur disaat seseorang terdapat masalah. Efeknya adalah membuat seseorang menjadi pecandu obat tersebut atau merasa ketergantungan. Selain itu, pada diri sendiri akan muncul berbagai penyakit dan hingga tidak sadarkan diri. Dari tidak sadarkan diri, seseorang dapat berbuat kriminal yang dapat membahayakan nyawa orang lain.

Dengan melihat bahaya penyalahgunaan narkoba yang begitu besar bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, maka diberlakukannya lah peraturan dan hukum di Indonesia yang menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya penggunaan barang haram tersebut dengan penggunaan yang melebihi dosis, dan selain penggunaan untuk terapi atau dalam dunia kesehatan. Dalam agama Islam juga tidak diperbolehkannya penggunaan hal yang memabukkan yaitu minuman keras (khamar) yang disamakan

dengan narkoba karena menyebabkan hilangnya akal sehat, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al Maidah ayat 90 berbunyi “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Al Maidah: 90).

Terdapatnya hukum di Indonesia maupun hukum secara Islam, tidak menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba dimasyarakat. Salah satu daerah di Indonesia dengan penyalahgunaan narkoba terbanyak yaitu Provinsi Riau. Riau yang terletak di pulau Sumatera ini dijadikan sebagai lalu lintas narkoba, karena daerahnya yang strategis dekat dengan perbatasan luar negeri yaitu Malaysia dan Singapura. Penyalahgunaan narkoba di Riau pada tahun 2016 meningkat sebanyak 20,38 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.453 kasus, dan 1.980 menjadi tersangka. Sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 1.207 kasus. Lebih memprihatinkan lagi, tersangka yang merupakan pengedar maupun penggunaanya berasal dari kalangan remaja. Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di daerah ini, juga tidak terlepas dari keuntungan menggiurkan dari bisnis haram tersebut (Harian Riau, “Kasus Narkotika di Riau Meningkat 20 Persen”, akses 13 April 2017).

Dari banyaknya kasus narkoba yang terjadi di daerah Riau, maka diperlukannya penanganan yang tepat dari pihak manapun. Paling utama peran keluarga sangat dibutuhkan, sebelum berada di lingkungan luar keluarga lah yang mempunyai hubungan sangat dekat sehingga bisa dilakukan dengan pendekatan interpersonal. Namun pemerintah juga harus memiliki kesadaran untuk menangani kasus ini. Suatu kegiatan atau gerakan yang pemerintah lakukan diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba pada masyarakat Riau. Salah satu bentuk kegiatan tersebut yaitu berupa kampanye. Kampanye adalah suatu tindakan serentak untuk mengadakan aksi yang dapat dilakukan oleh suatu kelompok, yang bertujuan untuk mencapai dukungan, dan dapat mempengaruhi khalayak.

Pada pemerintah, yang bertanggung jawab untuk menjalankan kampanye anti narkoba ini kepada masyarakat adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau) terutama Seksi Pencegahan Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), BNNP Riau pun dibantu oleh pihak lain seperti Polda Riau untuk mengungkap kasus penyalahgunaan Narkoba di Riau. Awalnya polisi mencari kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di daerah Riau, setelah kasus-kasus tersebut terungkap maka selanjutnya dilakukan penanganan dari Polda sendiri ataupun dapat diberikan kepada BNNP Riau untuk ditangani selanjutnya. BNNP Riau dan Polda Riau harus terus bekerja sama dalam mengungkap kasus penyalahgunaan yang terjadi di Riau.

Namun untuk sosialisasi, kampanye, atau kegiatan lain yang dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba dimasyarakat di daerah Riau telah menjadi tugas dari BNNP Riau khususnya Seksi Pencegahan divisi P2M. Badan Narkotika Nasional dibentuk oleh pemerintah untuk dapat mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Lebih khususnya, pemerintah berupaya dalam memerangi narkoba dengan membuat kebijakan nasional dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan P4GN. Agar lebih efektif dalam penanganan penyalahgunaan di seluruh daerah di Indonesia, maka diperlukannya keaktifan dari setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi di Indonesia. Terutama di provinsi Riau, dimana daerah ini memiliki peningkatan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mendekati penelitian ini. Pertama, , skripsi yang dibuat oleh Kurniawan (2011) yaitu tentang Strategi Kampanye Kehumasan Kepolisian Daerah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, pada Bagian Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan pada penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Polda DIY dengan melalui dua pendetakan yaitu komunikasi secara langsung dan melalui media tidak langsung. Dari evaluasi kampanye mempunyai beberapa tinjauan diantaranya sebagian masyarakat sadar seperti menyalakan lampu, memakai helm SNI, menggunakan SIM, dsb.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Alwahdi (2010) yaitu tentang strategi komunikasi Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan kesadaran anti narkoba. Penelitian ini tentang bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan kesadaran anti narkoba. Hasil dari penelitian ini adalah adanya tahapan strategi komunikasi yang dilakukan BNN DKI Jakarta sebelum melaksanakan sosialisasi anti narkoba, yaitu: perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Dilihat dari implementasinya, strategi komunikasi yang dilakukan oleh BNN DKI Jakarta lebih sering menggunakan media cetak dalam mensosialisasikan anti narkoba.

Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Jayanti (2010) yaitu tentang Manajemen Kampanye dalam Pemilihan Presiden 2009. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada kampanye yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti tentang kampanye politik, sedangkan penelitian ini tentang manajemen kampanye anti narkoba. Sehingga objek yang diteliti pun juga berbeda, pada penelitian terdahulu objek yang diteliti yaitu Tim Kampanye SBY-Boediono Kota Surakarta dalam pilpres 2009, sedangkan objek dari penelitian ini

adalah Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Namun terdapat beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu ini, yaitu teori yang digunakan adalah manajemen kampanye dan penggunaan analisis SWOT. Selain itu metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu deskripsi kualitatif.

B. Landasan teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Pada tahun 1970-an menjadi awal kemunculan studi tentang implementasi di Amerika Serikat. Munculnya ilmu ini sebagai bentuk reaksi keprihatinan atas efektivitas berbagai program reformasi. Selanjutnya terdapat beberapa generasi dalam studi implementasi ini. Tahun 1970-an yang dapat disebut sebagai generasi pertama, nada pesimis menjadi tanda yang mendominasi sebagian besar di tahun 1970-an. Beberapa studi kasus tentang contoh dari kegagalan implementasi menjadi pemicu dari pesimisme. Namun, terdapat prestasi yang paling penting dari generasi pertama peneliti implementasi yaitu meningkatnya kesadaran terhadap isu dalam komunitas ilmiah yang lebih luas dan masyarakat umum (Fischer dan Gerald, 2015 : 127).

Teori bukanlah menjadi fokus utama dalam studi implementasi pada generasi pertama, pada generasi selanjutnya atau generasi kedua yang mulai mengajukan berbagai kerangka teori dan hipotesis. Sehingga menimbulkan perdebatan yang dikenal dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Untuk menjadi penengah dari perdebatan tersebut, maka terbentuklah pendekatan atau teori baru yaitu hibrida. Terbentuknya teori ini dengan menggabungkan wawasan pemikiran dari kedua teori sebelumnya. (Fischer dan Gerald, 2015 : 128). Dari beberapa model implementasi kebijakan tersebut, peneliti menggunakan salah satunya yaitu Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (1978). Konsep dasar dari model ini adalah menggunakan

manajemen strategis, yang mengarah pada manajemen secara sistematis dan tentunya tidak meninggalkan kaidah dasar.

2. Manajemen Kampanye

Manajemen merupakan suatu kegiatan pengarahan atau pengawasan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan cara yang efektif efisien (Robbins, 2010; 7). Salah satu kegiatan yang memerlukan adanya manajemen yaitu kampanye. Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang/kelompok, karena melaksanakan kampanye seorang diri dianggap mustahil dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapatnya tahapan-tahapan pada manajemen, yang disebut dengan fungsi manajemen.

Fungsi manajemen menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan seperti kampanye. Sehingga fungsi-fungsi manajemen sangat dibutuhkan dalam sebuah kampanye, karena jika tidak melakukan tahapan-tahapan tersebut maka akan kesulitan melakukan kampanye. Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda terhadap fungsi-fungsi manajemen, namun peneliti mengambil fungsi manajemen dari G.R Terry yaitu (Badrudin, 2013; 14) :

a. G.R Terry

1. *Planning* (Perencanaan) : Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu G.R Terry “(*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposed activations believed necessary to achieve desired results*)” (Badrudin, 2013; 54)”
2. *Organizing* (Pengorganisasian) : G.R Terry mendefinisikan “*Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks*

under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective”

3. *Actuating* (Penggerakan) : Perencanaan merupakan strategi dasar organisasi yang akan dilaksanakan oleh pihak atau anggota organisasi maupun pihak-pihak luar organisasi (Siagian, 2005; 95). Pelaksanaan harus sangat diperhatikan, karena strategi, teknik, ataupun metode yang sudah dipikirkan dan telah ditentukan sebelumnya, tanpa adanya gerakan maka tentu saja tidak ada hasil yang dicapai dan tujuan organisasi pun tidak akan terwujud.
4. *Controlling* (Pengawasan) : . Pada tahap ini mengamati seluruh kegiatan organisasi sesuai atau tidaknya dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2005; 125). Dengan kata lain pengawasan yaitu membandingkan kegiatan yang terjadi dengan perencanaan sebelumnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menjelaskan fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data. Pada penelitian ini lebih menjelaskan kedalaman kualitas data bukan pada kuantitas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan data secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu, sehingga penulis dapat menemukan jawaban atas pertanyaan dari penelitian ini, yaitu penerapan manajemen kampanye dalam kampanye anti narkoba pada divisi P2M BNNP Riau.

Pada penelitian ini, sumber data berupa primer dan sekunder. Data primer meliputi wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu berupa dokumentasi. Lokasi dari penelitian ini adalah kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dengan

terdapatnya beberapa narasumber untuk memperoleh data dari penelitian ini, yaitu Seksi Pencegahan divisi P2M BNNP Riau, humas BNNP Riau, Kabid Narkoba Polda Riau, dan beberapa masyarakat Riau yang menjadi audiens kampanye.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Publik

Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan suatu kampanye anti narkoba di daerah Provinsi Riau adalah Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya Seksi Pencegahan. Masyarakat luas mengenalnya dengan kampanye anti narkoba, namun pada BNN kampanye ini disebut dengan Diseminasi Informasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).

Diseminasi informasi ini tidak mudah untuk dilakukan, diperlukan kerjasama yang baik dari semua anggota Seksi Pencegahan BNNP Riau. Tidak hanya itu, dengan adanya manajemen yang baik dilakukan oleh Seksi Pencegahan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen ini tentunya mencakup mulai dari pra pelaksana yaitu perencanaan dan pengorganisasian, pada saat pelaksanaan, dan terakhir pengevaluasian dari kampanye yang telah dilakukan.

Manajemen pada sebuah kegiatan diseminasi informasi P4GN yang dilakukan oleh BNNP Riau khususnya oleh Seksi Pencegahan, sangat relevan dengan teori implementasi kebijakan publik oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang menjelaskan tentang manajemen strategis, yaitu melaksanakan suatu kebijakan publik dengan mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat dalam manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan atau evaluasi. Sehingga kegiatan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tujuan yang ditentukan besar kemungkinan dapat terwujud.

Manajemen Kampanye Anti Narkoba

1. Perencanaan

Sebelum melaksanakan sebuah kampanye, sangat penting memikirkan perencanaan yaitu hal-hal seperti apa yang akan dijalankan pada saat melaksanakan kampanye nantinya. Dengan adanya perencanaan akan memudahkan pelaksana kampanye, karena terdapat aturan-aturan yang tersusun sehingga jelas kampanye seperti apa yang akan dijalan. Seksi Pencegahan melakukan perencanaan dengan cukup baik, dengan mengikuti berbagai aspek yang terdapat dalam perencanaan. Aspek aspek ini seperti yang dijelaskan Gregory (dalam Venus) yaitu :

a. Melakukan Analisis

Dengan melakukan analisis, diharapkan dapat menemukan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Seksi Pencegahan terlebih dahulu melihat jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau, data tersebut terdapat langsung pada BNNP Riau maupun dari Dit Res Narkoba Polda Riau. Setelah mengetahui jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau, Seksi Pencegahan yang juga berkerjasama dengan Dit Res Narkoba Polda Riau membagi berbagai data kasus tersebut menjadi beberapa sudut pandang, seperti dari segi umur, latar belakang pendidikan maupun pekerjaan, dan lain sebagainya.

b. Menyusun Tujuan

Seksi Pencegahan mempunyai tujuan dari kampanye yang dilakukan yaitu : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan edar gelap narkoba sehingga diharapkan akan tumbuh sikap dan perilaku anti terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memungkinkan dapat menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan dan mempersempit ruang gerak peredaran narkoba khususnya di Provinsi Riau.

c. Memilih Segmentasi Sasaran

Seksi Pencegahan mempunyai empat lingkungan sasaran pencegahan lewat Diseminasi Informasi P4GN yaitu :

1. Lingkungan Masyarakat (masyarakat tempat tinggal, kelompok masyarakat, organisasi, dll)
2. Lingkungan Keluarga (ibu rumah tangga, aktifis posyandu, aktifis PKK, dll)
3. Lingkungan Pekerja (usia bekerja)
4. Lingkungan Pendidikan (usia sekolah, Perguruan Tinggi).

d. Menentukan Pesan

Langkah awal menentukan pesan kampanye yaitu dengan memikirkan tema seperti apa yang cocok dengan kampanye. Tema merupakan pokok utama dalam sebuah pembahasan, pada satu tema terdapat berbagai macam pesan didalamnya. Agar tidak keluar dari inti yang disampaikan maka diperlukannya lah tema. Seksi Pencegahan menentukan tema dari segmentasi audiensnya, atau lingkungan sasaran/target. Dengan melihat siapa audiens dari kampanye yang akan disampaikan, memudahkan pihak Seksi Pencegahan menentukan tema dari sebuah kampanye.

e. Menentukan Strategi

Seksi Pencegahan mempersiapkan strategi sebelum melakukan berbagai kegiatan kampanye Anti Narkoba atau Diseminasi Informasi P4GN. Strateginya yaitu dengan melakukan berbagai inovasi, seperti mengikuti apa yang lagi ramai dibicarakan atau digunakan oleh masyarakat Provinsi Riau, salah satunya yaitu penggunaan *Hp*. Dengan begitu, Seksi Pencegahan melakukan kerja sama dengan PT.Telkomsel untuk dapat menyebarluaskan informasi P4GN kepada masyarakat sampai ke pelosok Provinsi Riau, dengan begitu juga dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu Seksi Pencegahan juga menggunakan media sosial, agar kampanye yang dilakukan tidak terlalu monoton yaitu pertemuan dengan tatap muka.

f. Pelaku Kampanye

Pelaku dari kampanye anti narkoba atau diseminasi informasi P4GN yaitu Seksi Pencegahan BNNP Riau. Seksi Pencegahan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti kampanye dalam bentuk donor darah maka Seksi Pencegahan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

g. Waktu dan Sumber Daya

Menentukan waktu pelaksanaan kampanye yaitu dengan adanya timeline pelaksanaan program kerja dari Seksi Pencegahan yang telah ditulis di awal tahun anggaran. Pada timeline tersebut, terdapat dua program kerja Seksi Pencegahan yaitu Diseminasi Informasi P4GN dan juga Advokasi. Program kerja tersebut dijadwalkan disetiap bulan pertahun dan dilengkapi dengan minggu keberapa akan dilaksanakan program kerja tersebut.

Selain mempunyai jadwal waktu yang sudah ditentukan pada awal tahun untuk melakukan program kerja, Seksi Pencegahan juga sering mendapat permintaan tambahan dari masyarakat untuk melaksanakan program kerja, baik Diseminasi Informasi P4GN maupun Advokasi.

h. Memilih Media

Pada Seksi Pencegahan, pemilihan media ini merupakan metode yang dilakukan untuk menyampaikan pesan kampanye atau diseminasi informasi P4GN kepada masyarakat. Terdapat tiga metode, yaitu : non elektronik (melakukan iklan di media cetak), elektronik (berupa radio, TV, informasi digital/media sosial), dan terakhir adalah konvensional (berupa seminar, sarasehan, sosialisasi tatap muka). Seksi Pencegahan menggunakan berbagai media yang ada. Terlihat dari berbagai media sosial yang dimiliki oleh BNNP Riau, yang dikelola oleh Humas BNNP Riau. Seksi Pencegahan membuat konten dari kampanye atau diseminasi informasi P4GN, yang akan diberikan kepada Humas untuk disebarluaskan melalui media sosial mereka seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Selain itu, dalam media sosial BNNP Riau juga terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan maupun BNNP Riau.

i. Evaluasi dan Tinjauan

Didalam perencanaan terdapat juga evaluasi awal yang harus dilaksanakan. Setelah memikirkan berbagai hal tentang kampanye yang akan dilakukan dimasyarakat, salah satu cara untuk melihat siap atau tidaknya pelaku kampanye menjalankan sebuah kampanye yaitu dengan melakukan uji coba atau latihan. Berbagai hal yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilatihkan terlebih dahulu, untuk melihat pada bagian mana yang dirasa kurang bagus agar dapat diperbaiki sebelum melaksanakan kampanye. Dengan adanya latihan ini, pelaku atau penyampai pesan kampanye diharapkan tidak panik pada saat menjalankan kampanye di masyarakat, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Pada Seksi Pencegahan, dilakukannya uji coba atau latihan sebelum melakukan kampanye.

2. Pengorganisasian

Diseminasi informasi P4GN yang dilakukan Seksi Pencegahan ini tentunya tidak hanya terdiri dari satu orang melainkan sebuah kelompok atau tim. Pada Seksi Pencegahan, tim ini disebut dengan panitia kegiatan yang isinya merupakan orang dari internal BNNP Riau, tidak hanya orang-orang dari Seksi Pencegahan saja. Panitia kegiatan ini terdiri dari ketua, penanggung jawab, dan anggota. Dibentuknya panitia kegiatan ini beberapa waktu yaitu sekitar seminggu sebelum dilaksanakan kampanye kegiatan. Seperti penjelasan dari Ibu Dina selaku Kepala Seksi Pencegahan dalam wawancara yang dilakukan peneliti, karena sudah terdapatnya jadwal yang tertulis di timeline program kerja selama setahun, maka panitia kegiatan akan dibentuk seminggu sebelum jadwal kampanye atau diseminasi informasi P4GN akan dilaksanakan.

Agar dapat mengatur setiap orang pada panitia kegiatan, dan kampanye atau diseminasi informasi P4GN berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan pengorganisasian yang baik. Adanya pengorganisasian dalam panitia kegiatan juga sangat penting, untuk menyatukan pemikiran bersama agar tujuan yang diinginkan organisasi dapat tercapai, hal ini seperti yang dijelaskan pada buku Siswanto (2005). Pada Seksi Pencegahan, cara menkoordinasikan para panitia kegiatan yaitu dengan

menerbitkan surat perintah tugas, yang berisi pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing panitia pada setiap kegiatan kampanye. Dengan begitu, setiap tugas panitia dibagi rata dan setiap panitia kegiatan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Namun tidak masalah membantu tugas antara satu dengan yang lainnya, karena itu juga gunanya sebuah tim, tetapi tentunya dengan tidak meninggalkan tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Penggerakan

Menyusun perencanaan pada sebuah kegiatan kampanye adalah langkah awal yang sangat bagus untuk dilakukan. Dalam buku Venus (2004) mengatakan bahwa dengan adanya perencanaan yang baik, maka akan menjadikan pola pikir dan tindakan berjalan dengan teratur atau terarah. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan yang diawali dengan rencana yang baik, kemungkinan untuk mencapai tujuan yang diinginkan akan besar. Namun tidak akan ada artinya sebuah perencanaan yang telah disusun dengan sangat baik, jika tidak adanya pelaksanaan/penggerakan atau aksi yang nyata. Pada pelaksanaan inilah penerapan dari rancangan program yang telah dibuat sebelumnya. Seksi Pencegahan tentunya melakukan setiap kegiatan diseminasi informasi P4GN kepada masyarakat Provinsi Riau yang sesuai dengan jadwal tertulis ditimeline. Pada bulan Oktober tahun 2017, sudah lebih dari setengah program kerja diseminasi informasi P4GN yang telah dilakukan oleh Seksi Pencegahan.

Tidak hanya melakukan program kerja yang sudah tertulis ditimeline, Seksi Pencegahan juga melakukan berbagai kegiatan diseminasi informasi P4GN yang tidak tertulis ditimeline program kerja, contohnya : Pembagian brosur di pusat keramaian seperti di mall, dan *car free day* pada hari minggu. Melakukan sosialisasi P4GN di sekolah-sekolah yang terdapat di Provinsi Riau. Melakukan tes urin pada setiap karyawan lingkungan kerja dari swasta maupun negeri, ini dilakukan oleh BNNP Riau sendiri atau diminta langsung dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Seksi Pencegahan yaitu Ibu Dina, diketahui bahwa jika dibandingkan program kerja tertulis dengan tidak tertulis, Seksi

Pencegahan lebih banyak melakukan program kerja yang tidak tertulis di timeline. Banyak dari masyarakat Provinsi Riau yang sudah mulai peduli terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau, sehingga masyarakat sendiri yang ingin mendatangkan BNNP Riau untuk melakukan diseminasi informasi P4GN di lingkungannya.

Dengan adanya kepedulian dari masyarakat sendiri tentunya memudahkan pihak dari Seksi Pencegahan untuk dapat melakukan diseminasi informasi P4GN ke masyarakat Provinsi Riau. Beberapa masyarakat juga menyediakan berbagai keperluan untuk pelaksanaan diseminasi informasi P4GN yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan, sehingga Seksi Pencegahan tidak perlu memikirkan anggaran tambahan untuk melakukan diseminasi informasi yang diminta langsung oleh masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di beberapa tempat keramaian seperti di mall dan di *car free day*, Seksi Pencegahan menyediakan anggaran sendiri untuk kegiatan diseminasi informasi P4GN.

4. Pengawasan

Setelah melaksanakan kampanye atau diseminasi informasi P4GN kepada masyarakat Riau, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Seksi Pencegahan yaitu pengawasan terhadap setiap kegiatan diseminasi informasi P4GN yang telah dilakukan. Pengawasan yang dimaksud yaitu melihat apakah pelaksanaan diseminasi informasi P4GN berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Langkah yang dapat dilakukan pada tahap pengawasan yaitu dengan mencatat hasil setiap kegiatan diseminasi informasi P4GN yang telah dilakukan. Pada BNNP Riau, bagian yang bertugas melakukan pencatatan hasil kegiatan tersebut dan membuat laporan adalah bagian Pengolah data dan Pengadministrasi. Dari laporan inilah diketahui pada bagian mana yang kurang sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya, yang dapat mengurangi efektifitas dari pelaksanaan diseminasi informasi P4GN dan pesan yang disampaikan kurang diterima oleh masyarakat.

Selain mencatat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, melakukan survey kepada audiens kampanye atau diseminasi informasi P4GN juga sangat penting dalam tahap pengawasan atau evaluasi, karena dari survey ini dapat diketahui apakah kampanye yang disampaikan efektif sehingga dapat diterima oleh audiens. Namun kampanye dengan menggunakan media seperti media elektronik dan cetak, Seksi Pencegahan belum dapat melakukan survey dari audiens media tersebut, karena memang belum terdapat alat melakukan survey tersebut. Sehingga survey yang dapat dilakukan yaitu dengan menanyakan langsung kepada audiens dari kegiatan kampanye dengan metode konvensional yaitu seperti : seminar, sosialisasi tatap muka, dan lain sebagainya.

Dari pengawasan yang telah dilakukan, terdapat dua jenis pengawasan berdasarkan subjek yang dijelaskan dalam buku Sule dan Kurniawan (2005) yaitu internal dan eksternal. Internal adalah pihak BNNP Riau sendiri yang melakukan pengawasan yaitu dengan menulis laporan hasil kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan pihak luar dari BNNP Riau yaitu audiens dari kampanye yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan. Namun pihak BNNP Riau atau Seksi Pencegahan dapat mengetahui hasil dari pengawasan pihak eksternal tersebut dengan melakukan survey yaitu dapat dengan wawancara maupun kuesioner.

Pada penelitian ini peneliti melakukan survey dengan salah satu guru dan salah satu siswa di SMAN 1 Pekanbaru. Sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi oleh pihak BNNP Riau, dan Ibu Dina Sebagai Kepala Seksi Pencegahan menjadi Pembina pada Upacara yang dilaksanakan Senin Pagi pada tanggal 16 Oktober 2017. Pada saat itu, Ibu Dina menjelaskan berbagai hal tentang narkoba, mulai dari memerangi narkoba yang harus dari akar-akarnya karena dapat merusak SDM Indonesia, hingga memberitahu strategi/cara-cara memberantas narkoba.

Salah satu guru dan siswa tersebut adalah audiens dari sosialisasi yang dilakukan BNNP Riau atau Seksi Pencegahan. Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu guru yang bernama Ibu Ana, dapat diketahui bahwa apa yang disampaikan

oleh Ibu Dina sebagai Pembina sangat bagus agar dapat memotivasi para siswa untuk menjauhkan narkoba, dan merasa apa yang disampaikan pada saat upacara lebih efektif dari apa yang disampaikan melalui sosialisasi dikelas, karena pada saat sosialisasi yang dilakukan sebelumnya hanya perwakilan beberapa siswa dari setiap kelasnya, sedangkan pada saat upacara semua siswa dapat mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh pihak BNNP Riau atau Seksi Pencegahan tentang informasi P4GN.

Namun jawaban seorang siswa yaitu sebagai Ketua Osis yang bernama Abdi, berbanding terbalik dengan jawaban Ibu Ana. Menurut Abdi, apa yang disampaikan oleh Ibu Dina sebagai Pembina Upacara pada hari Senin pagi tersebut, dianggap kurang efektif dan cukup membosankan. Apa yang dibicarakan oleh Pembina sangat monoton, Abdi menginginkan lebih dari omongan saja yaitu ditambah dengan adanya hiburan sehingga menarik minat remaja. Selain itu, Abdi juga memberi masukan untuk melaksanakan sebuah program yang hanya difokuskan satu atau dua sekolah tentang diseminasi informasi P4GN, tetapi selalu diawasi setiap beberapa waktu agar. Menurutnya, tidak masalah hanya satu atau dua sekolah saja untuk awalnya tetapi terfokus daripada semua sekolah tapi tidak memberikan hasil.

Dengan adanya survey terhadap audiens kampanye ini, dapat mengetahui respon langsung dari audiens sehingga mengetahui dimana letak kelebihan dan kekurangan dari kampanye yang dilakukan. Selain itu juga dapat memberi masukan kepada BNNP Riau, kampanye anti narkoba atau diseminasi informasi P4GN seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Provinsi Riau. Sehingga pesan yang disampaikan pun dapat lebih efektif dan tentunya dapat diterima oleh masyarakat, selain itu anggaran yang disediakan untuk kampanye atau diseminasi informasi P4GN oleh Seksi Pencegahan BNNP Riau tidak terbuang sia-sia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Manajemen Kampanye dalam Kampanye Anti Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau) Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Seksi Pencegahan Tahun 2017” dan mendapatkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau), yang bertanggung jawab menjalankan atau melaksanakan kampanye anti narkoba yaitu Seksi Pencegahan Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Kampanye anti narkoba tersebut dikenal dengan Diseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Implementasi manajemen kampanye yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam melakukan kampanye atau Diseminasi Informasi P4GN dapat dikatakan sesuai dengan kaidah-kaidah atau teori yang ada, yaitu mulai dari melakukan : perencanaan, yang didalamnya terdapat berbagai aspek seperti menentukan tujuan, strategi, menggunakan media apa saja yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Pada pengorganisasian yaitu mengatur setiap panitia untuk dapat menjalankan kegiatan kampanye dengan baik. Tahap penggerakkan yaitu menjalankan berbagai rencana yang telah dibuat sebelumnya. Terakhir yaitu pengawasan atau evaluasi. Semua tahapan dalam manajemen kampanye ini dilakukan oleh Seksi Pencegahan. Namun pada tahap evaluasi Seksi Pencegahan kurang melakukan survey kepada audiens kampanye anti narkoba.

Setiap kegiatan tentunya terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat kegiatan tersebut. Pada kegiatan kampanye atau diseminasi informasi P4GN yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan, faktor pendukungnya sebagai berikut : berasal

dari luar/eksternal BNNP Riau yaitu masyarakat Provinsi Riau yang sudah mulai antusias terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau, terlihat dari banyaknya panggilan dari luar institusi untuk melakukan kampanye atau sosialisasi. Sedangkan dari dalam/internal BNNP Riau yaitu terdapatnya kerjasama tim yang kuat antar sesama anggota dan juga anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan diseminasi informasi P4GN. Dari faktor penghambat yaitu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga dirasa cukup berat untuk melaksanakan kegiatan kampanye atau diseminasi informasi P4GN. Selain kurangnya SDM, belum terdapatnya survey terhadap audiens dari media massa menjadi faktor penghambat lainnya. Belum terdapatnya survey ini membuat pihak Seksi Pencegahan atau BNNP Riau tidak mengetahui apakah kampanye yang disampaikan efektif atau tidak. Sedangkan dari luar BNNP Riau yaitu kurangnya komitmen dari masyarakat Provinsi Riau.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dan menjadi keterbatasan dari peneliti. Kekurangan tersebut yaitu jumlah narasumber atau audiens dari diseminasi informasi P4GN. Peneliti hanya mengambil salah satu sekolah yang menjadi tempat dilaksanakannya diseminasi informasi P4GN yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan, dan hanya melakukan wawancara dengan salah satu guru dan salah satu murid di sekolah tersebut. Tidak cukupnya waktu yang tersedia membuat peneliti tidak dapat menambah narasumber atau audiens dari diseminasi informasi P4GN

C. Saran

1. Saran Akademis

Penelitian yang dilakukan peneliti ini masih memiliki kekurangan, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang serupa untuk dapat melakukan pengembangan dan melakukan pembahasan dari data yang ditemukan

dengan memperdalam teori yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil data tentang manajemen kampanye secara mendalam atau secara detail, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Selain itu, disarankan untuk melakukan wawancara atau survey terhadap beberapa audiens dari kampanye, untuk mengetahui apakah efektif atau tidaknya kampanye yang telah dilakukan.

2. Saran Praktis

Untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau) khususnya Seksi Pencegahan Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang menjadi objek dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang peneliti akan sampaikan untuk masukan bagi Seksi Pencegahan dalam melakukan kampanye atau diseminasi informasi P4GN yaitu meningkatkan kesadaran dalam melakukan manajemen kampanye mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Melakukan kampanye berbeda dari sebelumnya dan yang dapat menarik minat masyarakat untuk dapat ikut serta dalam kampanye maupun menjadi relawan anti narkoba. Selain itu, disarankan bagi Seksi Pencegahan untuk melakukan survey pada audiens dari setiap kampanye atau diseminasi informasi P4GN yang telah dilakukan. Adanya survey ini guna untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari kampanye yang telah dilakukan, sehingga menjadi masukan bagi Seksi Pencegahan untuk melakukan kampanye atau diseminasi informasi P4GN selanjutnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Fischer, Frank, Gerald J.Miller, Mara S.Sidney. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode* (Terj : Imam Baihaqie) . Bandung : Nusa Media.
- Lisa FR, Julianan, Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Robbins, Stephen P, Mary Coulter. 2010. *Manajemen*, Edisi Kesepuluh, Jilid 1. (Terj: Bob Sabran, Devri Barnadi Putera). Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siswanto, B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sule, Ernie Tisnawati, Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Venus, Antar. 2004. *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Undang-Undang

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sekretariat Negara. Jakarta.

Skrripsi

- Arya Kurniawan. 2011. *Strategi Kampanye Kehumasan Kepolisian Daerah dalam Sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan (Studi Deskriptif pada Bagian Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Sripsi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII.

Badru Tamam Alwahdi. 2010. Strategi Komunikasi Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta dalam Mensosialisasikan Kesadaran Anti Narkoba. Sripsi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Windhy Jayanti. 2010. Manajemen Kampanye dalam Pemilihan Presiden 2009 (Studi Deskriptif Kualitatif Manajemen Kampanye Tim Kampanye Sby-Boediono dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Surakarta). Skripsi pada Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Internet

<http://harianriau.co/mobile/detailberita/9699/kasus-narkotika-di-riau-meningkat-20-persen> , diakses 13 April 2017.

Identitas Penulis

1. Identitas Penulis Pertama

Nama Lengkap : Nadra Alfiati
Nomor Induk Mahasiswa : 14321049
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01 Desember 1995
Program Studi : Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi
dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas
IslamIndonesia
Bidang Minat Studi : Spesifik PR
Alamat dan Nomor Kontak : Jl. Gunung merapi no 1, Pekanbaru, Riau.
No. hp 082211203470
nadraalfiatii@gmail.com

2. Identitas Penulis Kedua

Nama Lengkap : Sumekar Tanjung, S.Sos.,.M.A
NIK/NIDN : 0514078702
Jabatan Akademik : Dosen Program Studi Ilmu
Komunikasi, Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam
Indonesia
Alamat dan Nomor Kontak : Yogyakarta, 085743370314